

Efektivitas Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Sidowarek Ngoro Jombang

Noviana Nur Sholikhah*¹, Hendi Yoga Pranata², Putri sekar arum Anggraeni³, Amin Awal Amarudin⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, UNWAHA Jombang Indonesia

*e-mail: novinoviana126@gmail.com¹, hendiyoga862@gmail.com², putrisekararums@gmail.com³, aminawal@gmail.com⁴

Abstrak

Kemiskinan masih menjadi masalah utama di Indonesia dan oleh karena itu merupakan tanggung jawab bagi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mengeluarkan sejumlah program dan kegiatan untuk mengentaskan kemiskinan. Salah satu program yang dilaksanakan pemerintah Indonesia adalah Program Keluarga Harapan (PKH). PKH merupakan program penyaluran dari pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) RI untuk keluarga tidak mampu atau rentan miskin. Pemerintah juga menyalurkan bantuan untuk membantu masyarakat dengan perekonomian atau jaring pengaman sosial. PKH diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam jangka pendek dan memutus rantai kemiskinan dalam jangka panjang. Tujuan PKH adalah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial dengan membantu meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data digunakan untuk mendapatkan data dari narasumber. Teknik observasi digunakan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya di lapangan. Sedangkan kendala pelaksanaannya terletak pada sulitnya mengumpulkan seluruh peserta setiap bulannya untuk dilakukan pemantauan dan pengawasan.

Kata kunci: Efektivitas, Dampak Kemiskinan, Program Keluarga Harapan

Abstract

Poverty is still a major problem in Indonesia and therefore it is the government's responsibility to improve people's welfare. Therefore, the Indonesian government has launched a number of programs and activities to alleviate poverty. One of the programs implemented by the Indonesian government is the Family Hope Program (PKH). PKH is a distribution program from the government through the Indonesian Ministry of Social Affairs (Kemensos) for underprivileged or vulnerable families. The government also distributes aid to help people with the economy or social safety nets. PKH is expected to reduce the expenditure burden on poor families in the short term and break the chain of poverty in the long term. The aim of PKH is to increase community access to education, health and social protection services by helping improve the quality of life of poor families. This research aims to analyze the effectiveness of the Family Hope Program (PKH) in alleviating poverty in Sidowarek Village, Ngoro District, Jombang Regency. This study used descriptive qualitative method. Data collection techniques are used to obtain data from sources. Observation techniques are used to determine the actual situation in the field. Meanwhile, the obstacle to implementation lies in the difficulty of gathering all participants every month for monitoring and supervision

Keywords: Effectiveness, Impact of Poverty, Family Hope Program

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan atau deprivasi adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan juga disebabkan oleh kurangnya sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar atau sulitnya mengakses pendidikan dan pekerjaan (Sustari & Sayuti, 2022). Kemiskinan juga menjadi faktor penghambat pembangunan yang diwujudkan dengan keterbatasan, kurangnya kapasitas dan banyaknya kesenjangan. Konsep dari kemiskinan secara umum adalah kondisi seseorang atau sekelompok orang yang tidak mempunyai kecukupan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang nyaman, baik ditinjau dari sudut pandang ekonomi maupun sosial. Definisi ini berfokus pada kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya (Mahaeni, 2019).

Keterbatasan dalam memperoleh hak kebebasan hidup didasarkan pada tingkat harapan hidup, ketidakmampuan belajar, akses terhadap kesehatan yang memadai, dan tidak memadainya pemenuhan kebutuhan dasar, baik sandang maupun pangan. Keterbatasan dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup dasar secara umum disebabkan oleh terbatasnya peluang usaha dan lapangan kerja yang dimiliki, kurangnya keterampilan dan pengetahuan, serta kurangnya perlindungan kerja yang memadai (Aminudin et al., n.d.).

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengentasan kemiskinan di bidang perlindungan sosial, pemerintah Indonesia merencanakan Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2007, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-undang Perlindungan Sosial. bantuan No. 11 UU Perlindungan Sosial. 2009 yang berbunyi: "Perlindungan sosial adalah segala upaya untuk mencegah dan mengelola risiko guncangan dan kerentanan sosial (Nomor, 11 C.E.) Secara lebih luas, perlindungan sosial mencakup seluruh tindakan yang diambil oleh pemerintah, sektor swasta dan masyarakat untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan dasar, terutama bagi kelompok miskin yang rentan.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah suatu program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), jika mereka memenuhi persyaratan RTSM yang ditetapkan. Program PKH ini merupakan program yang dibuat oleh Kementerian Sosial RI yang berlandaskan pada Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, No: 31/KEP/MENKO/-KESRA/IX.2007 tentang "Tim Pengendali Program Keluarga Harapan" (Kemiskinan, 2012) Program ini merupakan bantuan tunai bersyarat yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan dan kesehatan.¹ Tidak semua keluarga penerima manfaat bisa menjadi peserta PKH, hanya keluarga yang mempunyai komponen kesehatan yakni ibu hamil atau menyusui dan anak berusia nol sampai dengan enam tahun, kemudian komponen pendidikan serta komponen kesejahteraan sosial.

Berikut adalah ringkasan mengenai penelitian atau kajian terhadap Program Keluarga Harapan, antara lain (Syariah & Surabaya, 2014) hasil penelitian Ananda Syahrini PKH di bidang pendidikan memberikan kesempatan yang lebih baik kepada anak. Dan dengan bantuan pemerintah yang diberikan kepada rumah tangga sangat miskin, hal ini sangat bermanfaat terutama untuk pendidikan anaknya, anak-anak dari keluarga RTSM dapat menempuh pendidikan dasar minimal pendidikan dasar 9 tahun. Kemudian hasil penelitian Aprilia Saraswati Dengan adanya PKH, pendidikan dan kesehatan mampu menurunkan angka kemiskinan meski efektivitasnya hanya 80%. Sedangkan dalam perspektif model Islam hanya mengentaskan kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan, mengentaskan kemiskinan yang berdasarkan keadilan, tanggung jawab, kasih sayang dan menghindari ketidakadilan. PKH hanyalah salah satu bentuk jaminan sosial bagi masyarakat yang diberikan oleh pemerintah untuk sepenuhnya meningkatkan perekonomian keluarga yang cukup di masa pendek.

Tujuan utama PKH adalah memberikan kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia kelompok sangat miskin. Dalam jangka

pendek, bantuan ini meringankan beban belanja RTSM, sementara dalam jangka panjang, bantuan ini berinvestasikan untuk generasi masa depan yang lebih baik melalui peningkatan kesehatan dan pendidikan (modal manusia) dengan memaksa keluarga penerima untuk menyekolahkan anak-anak mereka (Fathoni et al., 2023) PKH yakni suatu program pemerintah yang sudah di ikuti oleh hampir setiap provinsi yang ada di Indonesia, akan tetapi belum menyeluruh. Walaupun demikian PKH tetap diharapkan pemerintah sebagai program yang mempunyai tujuan umum yang mampu memutus rantai kemiskinan antar generasi.

Kebijakan pemerintah untuk memecahkan masalah yang ada di ranah publik, itu bukan hanya rencana atau perumusan program akan tetapi, juga pelaksanaan dari program tersebut guna memenuhi tujuan yang telah direncanakan. Sementara secara khusus tujuan dari PKH menurut peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 2018 yakni: (1) meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan kesehatan dan kesejahteraan bagi peserta Program Keluarga Harapan, (2) meningkatkan taraf pendidikan peserta, (3) meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, anak berusia 0 sampai dengan 6 tahun dan anak prasekolah anggota keluarga sangat miskin, (4) meningkatkan kondisi sosial ekonomi para peserta Program Keluarga Harapan. Meskipun berjalan dengan baik bukan berarti untuk pelaksanaan dari bantuan sosial program unggulan kementerian sosial menjadi sempurna namun, juga memiliki kelemahan yakni apabila bantuan sosial tersebut tidak selalu tepat sasaran. Penyebab PKH menjadi tidak tepat sasaran bisa jadi dikarenakan pemerintah desa masih menggunakan data sensus kependudukan lama yang belum diperbarui. Selain itu, adanya kedekatan hubungan antara kader yang mendata dengan masyarakat juga menjadi salah satu penyebab bantuan sosial PKH tidak tepat sasaran (Ekardo et al., 2014) Dalam hal ini petugas memungkinkan untuk mengabaikan masyarakat kurang mampu tidak dekat dengannya yang seharusnya menjadi penerima bantuan tersebut. Pemerintah diharapkan memberikan pengawasan yang lebih ketat lagi agar penyaluran bantuan PKH Kementerian Sosial ini benar-benar diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Ini adalah program bantuan yang direncanakan secara terpusat oleh pemerintah Indonesia. Dalam pelaksanaannya terdapat banyak aspek yang terlihat. Dalam hal ini memungkinkan terjadinya penyimpangan dari peraturan-peraturan pelaksanaan program tersebut yang sudah ditetapkan. Kondisi di masyarakat Desa Sidowarek Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang yang akan saya jadikan objek penelitian permasalahan yang muncul di desa sidowarek menunjukkan bahwa keluarga penerima manfaat PKH masih ada yang berasal dari warga cukup mampu dengan kondisi ekonomi menengah keatas yang seharusnya tidak menerima bantuan tersebut, bahkan sebaliknya warga yang kurang mampu dimana untuk segala komponen yang sudah disebutkan dalam Peraturan Menteri Sosial sebagai penerima manfaat bantuan sosial PKH justru tidak menerima bantuan tersebut berupa tunai maupun non tunai.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dengan pendekatan case study. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, keyakinan, persepsi, pikiran secara individu dan kelompok dalam suatu konteks setting tertentu yang dikaji dari perspektif yang utuh, komprehensif dan holistic. Sebuah deskripsi digunakan untuk mengeksplorasi prinsip-prinsip dan penjelasan kemudian ditarik kesimpulan. Dengan objek penelitian terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Sidowarek Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi. Target wawancara pada penelitian ini adalah, pendamping PKH dan 5 orang penerima PKH. Sedangkan teknik analisa data terdiri atas 4 tahap yakni: a. pengumpulan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, b. pemilihan, penyerdehanaan dan transformasi data mentah yang telah dikumpulkan sebelumnya dan kemudian dituangkan dalam bentuk uraian atau laporan secara terstruktur dan rinci, c. penyajian

data atau pemaparan informasi yang disusun sebelumnya, d. kesimpulan. Tempat penelitian ini berada di Desa Sidowarek yakni sebuah desa di wilayah Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Jumlah penduduk Desa Sidowarek sebanyak 3.499 jiwa yang terdiri dari 2.364 laki-laki dan 1.135 perempuan. Dengan memiliki 8 dusun diantaranya: Genjong Lor, Genjong Kidul, Wonorejo (Canga'an, Pandak, Bendo, Gerdu Laut, Maron dan Kweden

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Efektivitas Program

Gibson (Ekardo, 2014) menjelaskan bahwa, efektivitas adalah pencapaian tujuan melalui upaya bersama. (Putra et al., 2021) mendefinisikan bahwa konsep efektivitas sebagai suatu ukuran yang memberikan gambaran sejauh jauh mana suatu tujuan dapat tercapai. Berdasarkan definisi efektivitas yang telah dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan kemampuan kerja yang dilakukan oleh individu atau organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan rencana yang telah ditetapkan dengan hasil aktual yang dicapai. Suatu cara untuk mengukur sejauh mana suatu program berjalan guna untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan sebelumnya. (Joyo, 2017) menjelaskan bahwa efektivitas program merupakan kegiatan yang pelaksanaannya menampakkan ketetapan antara harapan yang kita inginkan dengan hasil yang dicapai, dimana ditunjukkan dengan ketepatan harapan, implementasi, dan hasil yang dicapai. Faktor yang mempengaruhi efektivitas program Menurut (S. L. Rachmadana et al., 2022) menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi efektivitas program terdiri dari 4 kriteria sebagai berikut: 1. Sasaran 2. Koordinasi 3. Sosialisasi 4. Jumlah bantuan

3.2 Kemiskinan & Dampak Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah kronis yang umum terjadi di banyak negara, terutama negara-negara berkembang. Berbagai upaya telah dilakukan di berbagai negara untuk mengentaskan kemiskinan seperti program bantuan langsung tunai di India, pemotongan pajak produk pertanian di China, serta upaya transformasi struktur perekonomian dari sektor pertanian ke sektor manufaktur yang terjadi di Afrika. Namun, menyelesaikan masalah kemiskinan tidaklah mudah bukti menunjukkan bahwa hingga saat ini permasalahan kemiskinan masih menghantui pemerintah di berbagai negara.

Angka kemiskinan di Indonesia tercatat sebesar 9,57% pada tahun 2022. Angka tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara keempat dengan angka kemiskinan terendah di Asia Tenggara. Posisi Indonesia berada di atas dengan angka kemiskinan sebesar 6,3% pada tahun 2021. Di sisi lain, program pengentasan kemiskinan yang direncanakan pemerintah seperti stabilisasi harga, bantuan tunai masyarakat, dan alokasi modal untuk desa masih belum diperhatikan, efektif dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia.

Kemiskinan sebagai masalah sosial dapat berdampak pada individu dan masyarakat secara keseluruhan. Kemiskinan juga dapat menimbulkan dampak lain sebagai berikut:

1. Meningkatnya kriminalitas di daerah

Sebagai salah satu penyebab terjadinya kriminalitas, penyebabnya adalah masyarakat miskin cenderung ingin memenuhi kebutuhan dasarnya dengan cara apapun, termasuk kriminalitas.

2. Meningkatnya angka kematian

Masyarakat miskin yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya akan kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan dapat menyebabkan peningkatan angka kematian penduduk, khususnya angka kematian.

3. Tertutupnya akses terhadap pendidikan

Salah satu penyebab terjadinya kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan, oleh karena itu tertutupnya akses terhadap pendidikan dapat berdampak pada kemiskinan suatu daerah atau bangsa.

4. Meningkatnya angka pengangguran

Masyarakat miskin akan kesulitan mengakses pendidikan yang memadai. Dengan demikian, akan sulit bagi masyarakat miskin untuk bersaing mendapatkan pekerjaan dengan masyarakat kaya atau berada. Hal inilah yang bisa menyebabkan meningkatnya angka pengangguran.

3.3 Pelaksanaan Program Keluarga Harapan

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang ini telah dimulai pada tahun 2019. Setelah mengidentifikasi peserta ditetapkan dan menyiapkan buku rekening, masyarakat mendapatkan bantuan dana dari PKH yang diterima masyarakat sebanyak 4 kali dalam setahun. Khusus pada bulan Januari, April, Juli dan Oktober, namun pada masa pandemi Covid-19, dana bantuan PKH diterima masyarakat setiap bulannya. Pada tahun 2023 bansos PKH dilaksanakan dalam empat tahap, yaitu tahap pertama pada bulan Januari hingga Maret, tahap kedua pada bulan April hingga Juni, tahap ketiga pada bulan Juli hingga September, tahap keempat pada bulan Oktober hingga Desember 2023 (S. L. R. L. Rachmadana, 2021). Pemutakhiran ini dilakukan oleh pendamping desa, dengan bantuan kepala desa. Kegiatan update ini merupakan kegiatan peninjauan untuk mengecek status sosial keluarga, apakah terjadi peralihan dari miskin ke tidak miskin atau status peserta berpisah atau bercerai.

Selain Program Keluarga Harapan (PKH), pemerintah juga akan terus menyalurkan beberapa program perlindungan sosial tahun 2023 seperti Program Sembako atau Bantuan Pangan Non- Tunai (BPNT), Bantuan Pangan untuk Lansia dan Disabilitas Mandiri, Beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) Dikdasmen Kemendikbudristek, Beasiswa PIP Kementerian Agama, Kartu Prakerja, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, Penerima Bantuan Iuran Kartu Indonesia Sehat/ BPJS Kesehatan dan Tanggap Bencana.

Di bidang pendidikan, pendamping desa melakukan asesmen dengan mengunjungi sekolah tempat anak peserta yang menerima bantuan PKH. Baik di tingkat SD, SMP, maupun SMA, hal ini ditunjukkan melalui kehadiran mereka (Iskandar, 2013) Pada tahun 2020, akibat pandemi Covid-19 (Sorong et al., 2023), rata-rata sekitar 90% siswa di desa Sidowarek mengikuti kelas online. Awalnya ada kendala, termasuk tidak memiliki *smartphone*. Namun, pada akhirnya menggunakan *smartphone* milik orang tuanya. Hal ini menunjukkan bahwa aspek pendidikan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Kementerian Sosial, dimana tingkat partisipasi atau kehadiran anak di sekolah minimal sebesar 85%. Sementara itu, pengkajian kesehatan sosial dilakukan melalui kunjungan langsung ke lansia dan penyandang disabilitas. Pendamping memeriksa status kesehatannya, lansia dan penyandang disabilitas wajib melakukan pemeriksaan kesehatan bulanan dengan memberikan bukti berupa data pemeriksaan kesehatan yang dilakukan.

3.4 Kategori bansos yang telah ditetapkan oleh kemensos

Kementerian Sosial telah mengidentifikasi tujuh kelompok penerima bantuan PKH, antara lain:

- Balita usia 0-6 tahun akan menerima bantuan sebesar Rp3000.000 per tahun atau Rp750.000 setiap periode sebanyak 4 tahap.
- Kategori ibu hamil dan masa nifas akan menerima bantuan sebesar Rp3000.000 per tahun atau Rp750.000 setiap periode sebanyak 4 tahap.
- Kategori siswa Sekolah Dasar (SD) akan menerima bantuan sebesar Rp900.000 per tahun atau Rp225.000 setiap periode sebanyak 4 tahap.
- Kategori siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) akan menerima bantuan sebesar Rp1.5000.000 per tahun atau Rp375.000 setiap periode sebanyak 4 tahap.
- Kategori siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) akan menerima bantuan sebesar Rp2000.000 per tahun atau Rp500.000 setiap periode sebanyak 4 tahap.

- f. Kategori lansia berusia 70 tahun ke atas akan menerima sebesar Rp2.400.000 per tahun atau Rp600.000 setiap periode sebanyak 4 tahap.
- g. Kategori penyandang disabilitas berat akan menerima baaantuan sebesar Rp2.400.000 per tahun atau Rp600.000 setiap periode sebanyak 4 tahap.

Adapun jumlah prasarana pendidikan di Desa Sidowarek dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel.1 Prasarana pendidikan Desa Sidowarek

NO	Nama Prasarana	Jumlah
1	PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)	4
2	TK (Taman Kanak-kanak)	3
3	SD (Sekolah Dasar)	4
4	SMP (Sekolah Menengah Pertama)	0
5	SMA (Sekolah Menengah Atas)	0
Jumlah Total		11

Sumber: Data Monografi Desa Sidowarek, 2020

Tabel.2 prasarana kesehatan Desa Sidowarek

NO	Nama Prasarana	Jumlah
1	Posyandu Balita	6
2	Posyandu Lansia	5
3	Poskesdes	1
4	Pustu	0
Jumlah Total		12

Sumber: Data Monografi Desa Sidowarek, 2020

Pendapatan rata-rata penduduk desa Sidowarek adalah Rp550.000/bulan. Mata pencaharian warga desa Sidowarek sebagian besar adalah petani.

Hasil penelitian ini dilakukan melalui wawancara langsung dengan pendamping, koordinator daan anggota PKH yang mendapat bantuan dari PKH.

Tabel. 3 Hasil Wawancara Dilapangan

Narasumber	Jabatan	Hasil wawancara
Ibu Maspupah Afuizam	Kordinator PKH desa Sidowarek	“Sebenarnya sudah tepat sasaran ditahun 2019. dengan tambahan 5 kuota pada tahun 2020, ini menyebabkan kesalahan dalam kelayakan sasaran PKH. Dengan terpusat pada BDT (Basic Data Terpadu) yang lama, sedangkan BDT bisa berubah setiap tahunnya. Dengan adanya kesalahan dalam penetapan sasaran ini, menyebabkan adanya kecemburuan sosial.
Pak Teguh	Pendamping PKH	“pendamping juga rutin melaksanakan survei ke sekolah, posyandu dan tempat laiinya dalam 3 bulannya.

Pendamping PKH juga mengundang semua anggota penerima PKH untuk rapat 1 bulan 2 kali untuk mengetahui perkembangan pendidikan untuk komponen anak sekolah dan mengetahui perkembangan balita yang aktif ke posyandu, agar tetap menerima bantuan PKH. Pendamping PKH juga memantau anak di sekolah dan posyandu. Jika mereka yang tidak aktif di sekolah akan diperingatkan untuk kembali aktif bersekolah, jika peringatan tersebut tidak di hiraukan maka akan dicabut dalam penerimaan bantuan PKH.”

Ibu Ngatiah	Anggota penerima PKH	“Dengan adanya PKH ini sangat meringankan beban hidup saya sebagai lansia. Karena beberapa lansia ada yang terpaksa masih bekerja, jadi dengan adanya PKH sangat membantu.”
Ibu Siti Chotijah	Anggota penerima PKH	“Pencairan dana melalui ATM sangat memudahkan dalam pencairan dana PKH daripada sistem lama yang melalui kantor pos. Akan tetapi kasihan juga kalau lewat ATM itu sangat menyulitkan bagi orang gaptek dan para lansia yang tidak bisa mengambil sendiri.”
Ibu Ratna Sati	Anggota penerima PKH	“Jika dilihat dari penggunaan bantuannya bisa dikatakan cukup tepat, karena setiap peserta PKH paham cara menggunakan bantuan ini tergantung komponen yang didapat. Akan tetapi, sasaran bantuan PKH tersebut belum tepat sarannya, karena masih terdapat keluarga yang mempunyai kemampuan ekonomi cukup dan masih bisa menyekolahkan anaknya.”
Ibu Sumi	Anggota penerima PKH	“Perbedaan dulu dan sekarang itu beda, dulu disurvei tiap rumah oleh pendamping PKH sendiri tapi sekarang

dipasrahkan ke ketua kelompok masing-masing.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, saat ini sedang menghadapi beberapa kendala. Kendala yang muncul tidak hanya menyangkut pihak yang menerima PKH saja. Akan tetapi, dari pihak pendamping PKH sendiri. Untuk para penerima PKH mengeluhkan mengenai pembagian PKH yang tidak merata, uang dan sembako yang berupa beras dan telur yang belum diterima secara merata. Di sisi lain, pihak pendamping PKH mengeluhkan mengenai rendahnya SDM masyarakat sehingga saat diajari sekolah itu lama dan juga mengenai belum tepatnya sasaran PKH pada akhirnya yang disalahkan adalah pendamping PKH sendiri.

3.5 Kendala dalam pelaksanaan Program Bantuan Harapan

Setiap bulannya selalu diadakan pertemuan peserta PKH untuk dibina dan dibimbing agar masyarakat dapat meningkatkan kemampuan keluarganya. Hal ini dilakukan agar bantuan PKH tidak menjadi sumber pendapat utama keluarga yang akan diterima seumur hidup. Tujuan daripada PKH menurut Kemensos sebenarnya adalah upaya pertolongan pemerintah agar masyarakat miskin mendapatkan modal awal dalam meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Sehingga hal ini berdampak besar pada kesejahteraan keluarganya. Jadi di Desa Sidowarek sangat jarang ditemukan masyarakat yang benar-benar miskin dengan rumah yang tidak berlantai dan temboknya rusak. Rata-rata rumah di desa Sidowarek sudah berlantainya keramik, dan semua rumah sudah ber dinding batu. Sehingga jika ditinjau kemiskinannya masyarakat desa Sidowarek dapat dilihat dari rendahnya tingkat kependidikan, terbatasnya lapangan kerja, dan rendahnya tingkat kesehatan dan gizi.

Kendala yang terjadi selama pelaksanaan PKH adalah: Pertama, sulitnya menjadwalkan pertemuan kelompok yang biasanya dijadwalkan dua kali dalam sebulan. Hal ini terjadi karena setiap pertemuan yang dilakukan tidak dihadiri oleh seluruh peserta. Sehingga menjadi kesulitan pendamping untuk membimbing dan mengarahkan peserta PKH. Kendala kedua, tidak tepatnya sasaran PKH yang pada akhirnya pihak pendamping yang disalahkan. Dikarenakan adanya kesalahan dalam data dari pusat yang berasal dari BDT (Basic Data Terpadu) yang berupa pada data lama. Sedangkan BDT sendiri bisa berubah setiap tahunnya. Kendala ketiga, yakni terkait dengan pencairan dana yang terkadang tidak merata ke semua peserta. Hal ini terjadi karena kendala dari pihak bank dan juga dapat terjadi karena adanya perubahan status peserta yang tidak diketahui oleh peserta tersebut. Sehingga hal ini berdampak pada munculnya protes-protes ke kantor desa Sidowarek.

4. KESIMPULAN

Efektivitas adalah pencapaian tujuan melalui upaya bersama (Ekardo, 2014). Putra dkk. (2021) mendefinisikan efektivitas sebagai ukuran sejauh mana suatu tujuan dapat tercapai. Efektivitas program adalah kemampuan kerja individu atau organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan (Joyo, 2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program antara lain sasaran, koordinasi, sosialisasi, dan jumlah bantuan (Rachmadana et al., 2022).

Kemiskinan & Dampak Kemiskinan: Kemiskinan merupakan masalah kronis di banyak negara, termasuk Indonesia. Meskipun ada upaya untuk mengentaskan kemiskinan, namun kemiskinan masih menjadi masalah yang signifikan. Pada tahun 2022, angka kemiskinan di Indonesia berada pada angka 9,57%, terendah keempat di Asia Tenggara. Namun program pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah belum efektif dalam mengurangi kemiskinan.

Kemiskinan dapat menyebabkan meningkatnya kejahatan, angka kematian, tertutupnya akses terhadap pendidikan, dan meningkatnya angka pengangguran. Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, dimulai pada tahun 2019 dengan memberikan bantuan dana kepada peserta. Namun demikian, program perlindungan sosial lainnya juga diperlukan untuk mengatasi kemiskinan, antara lain Program Sembako, Bantuan Pangan Lanjut Usia dan Mandiri, Beasiswa Program Indonesia Pintar, Kartu Prakerja, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Bantuan Iuran Kartu Indonesia Sehat, dan Tanggap Bencana.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminudin, S., Kusuma, A., Sucipto, B., Rachmadana, S. L., Malang, U. N., & Merdeka, U. (N.D.). *The Digital Marketing Model Uses Social Media To Get Out Of The Economic Crisis Caused By Covid 19 Model Pemasaran Digital Menggunakan Media Sosial Untuk Keluar Dari Krisis Ekonomi Akibat Covid 19*. 27–36.
- Ekardo, A. (2014). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Nagari Lagan Hilir Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan. *Stkip Pgri Sumatera Barat Padang*.
- Ekardo, A., Firdaus, F., & Elfemi, N. (2014). Efektifitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Nagari Lagan Hilir, Kab. Pesisir Selatan. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 3(1), 1–9.
- Fathoni, M., Firda, E. A., & Aminudin, S. A. A. K. P. (2023). International Portfolio Diversification Opportunities For Stock Market Investors. *Remb: Research Economics Management And Business*, 1(1), 11–19.
- Iskandar, I. (2013). *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial*. Referensi.
- Joyo, N. M. (2017). Efektivitas Implementasi Program Gerakan Membangun Ekonomi Rakyat Lamongan Berbasis Pedesaan (Gemerlap) Di Desa Soko, Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan (2011-2015). *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 5(2), 150–158.
- Kemiskinan, T. N. P. P. (2012). *Panduan Pemantauan Program Penanggulangan Kemiskinan*, Buku Pegangan Tkpk Daerah. Jakarta, Tnp2k.
- Mahaeni, A. (2019). Evaluasi Program-Program Pengentasan Kemiskinan Di Provinsi Bali. *Jurnal Kependudukan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, 1(8), 18.
- Nomor, U.-U. (11 C.E.). *Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial*.
- Putra, S. A. A., Pratikto, H., & Winarno, A. (2021). Combination Of Character Change And Utilization Of Social Media As A New Strategy To Maintain Smes Resilience During The Covid-19 Pandemic. *Journal Of Business And Management Review*, 2(11), 760–771.
- Rachmadana, S. L., Putra, S. A. A., & Difinubun, Y. (2022). Dampak Artificial Intelligence Terhadap Perkonomian. *Fair Unimuda*, 2(2), 71–82.
- Rachmadana, S. L. R. L. (2021). Youth Entrepreneurial Spirit In Family Business. *Journal Of Business And Management Review*, 2(11), 772–784.
- Sorong, M., Jayanti, A., Rachmadana, S. L., Sorong, M., Irfan, A., & Alim, A. (2023). *Marketing Mix Improves Consumer Purchase Decisions*. 9(2), 368–384.
- Sustari, N. K. D., & Sayuti, M. (2022). Analisis Efisiensi Penggunaan Investasi Terhadap (Pdrb) Produk Domestik Regional Bruto Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015-2019. *Jurnal Kompetitif: Media Informasi Ekonomi Pembangunan, Manajemen Dan Akuntansi*, 8(2), 77–93.
- Syariah, T. P. F., & Surabaya, H. U. I. N. S. A. (2014). *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam.